



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SODIKIN
NIK : 3374090810770003
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Kerja : BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
PEGAWAI
Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN JABATAN
FUNGSIONAL
Jenis Laporan : Periodik - 2018
Tanggal Kirim : 13 Maret 2019

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap
 Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SODIKIN
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
3. NHK : 416971

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/56 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.759.300

1. MOTOR, HONDA GL15A1RRM/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
12.759.300

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 269.996.196

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 432.755.496

III. HUTANG Rp. 14.007.807

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 418.747.689

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.